

Penanggulangan Kemiskinan melalui Intervensi Sektor Ketenagakerjaan di Kota Singkawang

Kurniawan Udi¹

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang

Histori Naskah

Diserahkan:
23-07-2026

Direvisi:
12-09-2026

Diterima:
19-09-2026

ABSTRACT

Poverty remains a strategic development issue in Singkawang City. Although the poverty rate declined to 4.28 percent, or approximately 10.36 thousand people, in 2025, this improvement has not been fully accompanied by inclusive gains in community welfare. The relatively high open unemployment rate, low labor force participation, and limited opportunities for productive employment indicate that regional economic growth has not yet fully generated adequate employment opportunities. This working paper aims to analyze labor-related factors associated with poverty and formulate policy alternatives to accelerate poverty reduction in Singkawang City. The study employs an evidence-based policy approach using secondary data from Statistics Indonesia (BPS), regional development planning documents, and relevant regulations. The analysis applies the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method and the Theory of Change (ToC). The findings indicate that poverty is closely associated with a mismatch between workforce competencies and business-sector needs, limited formal job creation, low levels of labor-intensive investment, suboptimal MSME development, and fragmented poverty alleviation data. Based on these findings, three main policy directions are proposed: revitalizing vocational education and industry-oriented job training; strengthening MSMEs through capacity building and improved access to financing; and expanding labor-intensive investment supported by stronger poverty data governance. These policy directions are intended to expand productive employment opportunities, strengthen the local economy, and promote sustainable poverty reduction in Singkawang City.

Keywords : poverty, employment, unemployment, evidence-based policy, Theory of Change

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi isu strategis pembangunan di Kota Singkawang. Meskipun tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,28 persen atau sekitar 10,36 ribu jiwa pada 2025, perbaikan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang inklusif. Tingginya pengangguran terbuka, rendahnya partisipasi angkatan kerja, dan terbatasnya kesempatan kerja produktif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai. *Working paper* ini bertujuan menganalisis faktor-faktor ketenagakerjaan yang berkontribusi terhadap kemiskinan serta merumuskan alternatif kebijakan untuk mempercepat penurunannya di Kota Singkawang. Penelitian menggunakan pendekatan *evidence-based policy* dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan regulasi terkait. Analisis dilakukan menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) dan Theory of Change (ToC). Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha, terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal, rendahnya investasi padat karya, belum optimalnya pengembangan UMKM, serta belum terintegrasinya data penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan tiga arah kebijakan utama, yaitu revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, penguatan UMKM melalui peningkatan kapasitas dan akses permodalan, serta peningkatan investasi padat karya yang didukung penguatan tata kelola data kemiskinan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja produktif, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : kemiskinan, ketenagakerjaan, pengangguran, evidence-based policy, Theory of Change

Corresponding Author : Kurniawan Udi, e-mail: udikurniawandishub12@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Kota Singkawang merupakan isu pembangunan yang bersifat multidimensional dan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kondisi ketenagakerjaan, serta kemampuan ekonomi masyarakat dalam menciptakan sumber penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi dan perluasan kesempatan kerja produktif (Bappenas, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kota Singkawang menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 10,36 ribu jiwa atau sebesar 4,28 persen dari total penduduk (BPS Kota Singkawang, 2026). Namun demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satunya ditunjukkan oleh meningkatnya Garis Kemiskinan yang mencapai Rp638.961 per kapita per bulan pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya tekanan terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, aspek ketenagakerjaan masih menjadi tantangan utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada pada angka 7,42 persen pada tahun 2025, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,89 persen (Statistik Kota Singkawang, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja yang cukup dan produktif bagi masyarakat. Permasalahan ketenagakerjaan tersebut juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (*skill mismatch*) (Disnakertransesdm, 2026). Sebagian masyarakat miskin masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga berdampak terhadap kemampuan memperoleh pekerjaan yang layak (Irham et al., 2025). Di sisi lain, pengembangan ekonomi lokal dan UMKM yang memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi digital, legalitas usaha, serta akses pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja produktif, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkuat sinergi program penanggulangan kemiskinan berbasis data.

Meskipun tingkat kemiskinan Kota Singkawang mengalami penurunan hingga mencapai 4,28 persen pada tahun 2025, masih terdapat tantangan struktural yang dapat menghambat keberlanjutan penurunan kemiskinan. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,42 persen menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki akses terhadap pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan sehingga berdampak terhadap kemampuan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu belum optimalnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif, serta belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata, khususnya oleh kelompok miskin dan rentan miskin. Dengan demikian, percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang memerlukan kebijakan yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja produktif, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan kondisi pasar kerja, kualitas tenaga kerja, dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang produktif. Alisjahbana dan Manning menunjukkan bahwa dimensi ketenagakerjaan, terutama

sektor pekerjaan dan *underemployment* memiliki keterkaitan yang kuat dengan kemiskinan di Indonesia, khususnya pada pekerja informal di wilayah perkotaan (Alisjahbana & Manning, 2006). Sementara itu, Murti dan Kurniawan menemukan bahwa partisipasi angkatan kerja, produktivitas tenaga kerja, upah minimum, dan pendidikan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang direpresentasikan melalui pengeluaran per kapita di Jawa Tengah (Murti & Kurniawan, 2020). Penelitian Rambe et al. juga memperlihatkan bahwa pendidikan pekerja, jenis pekerjaan, investasi, dan industrialisasi merupakan faktor yang berkaitan dengan kemiskinan di kabupaten/kota di Sumatra; studi tersebut menekankan pentingnya penciptaan pekerjaan di sektor nonpertanian serta peningkatan keterampilan tenaga kerja (Rambe et al., 2023). Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan data agregat nasional atau wilayah yang lebih luas dan berfokus pada hubungan statistik antarfaktor sehingga masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana ketenagakerjaan pada tingkat kota diterjemahkan ke dalam prioritas intervensi dan desain kebijakan yang operasional. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada Kota Singkawang dengan mengintegrasikan identifikasi masalah ketenagakerjaan, Urgency, Seriousness, and Growth (USG), Root Cause Analysis (RCA), dan Theory of Change (ToC) untuk merumuskan alternatif kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis intervensi sektor ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kemiskinan serta merumuskan alternatif kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan yang berkontribusi terhadap keberlanjutan kemiskinan di Kota Singkawang; dan (2) alternatif intervensi kebijakan apa yang dapat dirumuskan untuk memperluas kesempatan kerja produktif dan mendukung penurunan kemiskinan secara berkelanjutan? Signifikansi penelitian terletak pada upaya menghubungkan analisis kondisi empiris ketenagakerjaan dengan proses perumusan kebijakan melalui pendekatan evidence-based policy, metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), Root Cause Analysis (RCA), dan Theory of Change (ToC), sehingga hasil penelitian menghasilkan kerangka intervensi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja produktif, memperkuat UMKM dan ekonomi lokal, serta mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan berbasis data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan evidence-based policy untuk menganalisis permasalahan kemiskinan dan ketenagakerjaan di Kota Singkawang serta merumuskan alternatif kebijakan yang berbasis pada kondisi empiris daerah. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Analisis dilakukan secara bertahap melalui identifikasi kondisi kemiskinan dan ketenagakerjaan, penentuan permasalahan prioritas menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), identifikasi akar permasalahan melalui Root Cause Analysis (RCA), serta perumusan hubungan antara akar masalah, intervensi, keluaran, hasil, dan dampak menggunakan pendekatan Theory of Change (ToC) (Setioko & Wangsanata, 2025; Syncore Indonesia, 2025; Winsky, 2021). Hasil dari rangkaian analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan alternatif dan rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui intervensi pada sektor ketenagakerjaan di Kota Singkawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Kemiskinan di Kota Singkawang

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mempublikasikan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Melalui pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur berdasarkan pengeluaran konsumsi. Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Singkawang menunjukkan tren yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 10,36 ribu jiwa atau sebesar 4,28 persen dari total penduduk. Capaian ini menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi dan berpotensi kembali masuk ke dalam kategori miskin.

Di sisi lain, Garis Kemiskinan Kota Singkawang terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp638.961 per kapita per bulan. Peningkatan Garis Kemiskinan menunjukkan meningkatnya kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk mempertahankan standar hidup layak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun persentase kemiskinan menurun, tekanan ekonomi yang dihadapi rumah tangga miskin dan rentan masih cukup besar.

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan diperoleh dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari yang dihitung berdasarkan konsumsi berbagai komoditas pangan utama. Sementara itu, Garis Kemiskinan Nonmakanan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan esensial lainnya.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu ukuran utama dalam menentukan tingkat kemiskinan dan menjadi dasar perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun daerah. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Singkawang menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp510.596 per kapita per bulan. Nilai tersebut meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp614.077 per kapita per bulan pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi Rp638.961 per kapita per bulan pada tahun 2025. Secara kumulatif, Garis Kemiskinan Kota Singkawang meningkat sekitar 25,14 persen selama periode 2020–2025.

Peningkatan Garis Kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk mempertahankan standar hidup layak semakin tinggi. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga berbagai komoditas kebutuhan pokok, biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan dasar lainnya yang menjadi komponen pembentuk Garis Kemiskinan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin dan rentan masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup besar meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun.

Di sisi lain, meningkatnya Garis Kemiskinan tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang sebanding. Akibatnya, kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetap rentan mengalami penurunan kesejahteraan dan

berpotensi kembali masuk ke dalam kategori miskin apabila terjadi guncangan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau kehilangan sumber pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga harus mampu meningkatkan daya tahan ekonomi rumah tangga miskin dan rentan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Penduduk Miskin (P0)

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Dalam pengukuran resmi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu mengukur kemiskinan berdasarkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan minimum yang dinyatakan dalam nilai Garis Kemiskinan (GK). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan yang terjadi di Kota Singkawang dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu persentase penduduk miskin (P0), jumlah penduduk miskin, serta Garis Kemiskinan. Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Singkawang selama periode 2020–2025 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali dan berada pada kisaran 4–5 persen. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,28 persen atau sekitar 10,36 ribu jiwa, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,53 persen atau sekitar 10,82 ribu jiwa. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi daerah, meningkatnya kesempatan kerja pada beberapa sektor usaha, serta pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi isu strategis pembangunan daerah karena masih terdapat kelompok masyarakat yang berada pada kategori rentan miskin. Kelompok ini memiliki tingkat kesejahteraan yang berada sedikit di atas Garis Kemiskinan sehingga sangat rentan terdampak oleh berbagai guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, kehilangan pekerjaan, maupun penurunan pendapatan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan Kota Singkawang masih tergolong relatif rendah (4,28%) dan berada di bawah rata-rata provinsi (6,16%) pada tahun 2025 (BPS Kalbar, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi daerah telah berjalan cukup baik. Namun demikian, keberhasilan tersebut perlu terus dijaga melalui kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja produktif, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap risiko kemiskinan.

Dari sisi jumlah penduduk miskin, Kota Singkawang menunjukkan perkembangan yang relatif fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 10,23 ribu jiwa pada tahun 2020, meningkat menjadi 10,82 ribu jiwa pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 10,36 ribu jiwa pada tahun 2025 (BPS Kota Singkawang,

2026). Penurunan tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascapandemi mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, jumlah penduduk miskin yang masih berada di atas sepuluh ribu jiwa menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, kondisi kemiskinan di Kota Singkawang menunjukkan tren yang membaik, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), terbatasnya kesempatan kerja formal dan produktif, serta masih rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan sebagian masyarakat miskin menjadi faktor yang memengaruhi lambatnya penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, serta penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan (GK). Indikator ini menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kebutuhan minimum yang harus dipenuhi. Sebaliknya, semakin rendah nilai P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan sehingga tingkat kedalaman kemiskinan menjadi lebih rendah (Ferezagia, 2018).

Indikator P1 memiliki peran penting dalam analisis kemiskinan karena tidak hanya mengukur jumlah penduduk miskin, tetapi juga menggambarkan tingkat kesulitan yang dihadapi penduduk miskin untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran dan prioritas intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Singkawang selama periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional maupun daerah. Pada tahun 2020 nilai P1 tercatat sebesar 0,48, kemudian meningkat hingga mencapai 0,86 pada tahun 2022 sebagai dampak perlambatan ekonomi dan tekanan inflasi pascapandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat miskin. Namun setelah tahun 2022, nilai P1 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten. Pada tahun 2024 nilai P1 turun menjadi 0,47 dan pada tahun 2025 kembali menurun hingga berada pada kisaran 0,4. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan dan tingkat kedalaman kemiskinan semakin berkurang.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat, tingkat kedalaman kemiskinan Kota Singkawang masih relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Kota Singkawang berada pada kategori miskin moderat atau rentan miskin, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, terutama melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap pekerjaan yang produktif.

Penurunan nilai P1 dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi daerah, peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa, penguatan program perlindungan sosial, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan kelompok miskin. Meskipun demikian, masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,42 persen pada tahun 2025 dan menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 65,89 persen

menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, upaya penurunan kemiskinan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja produktif, serta penguatan UMKM dan ekonomi lokal. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan sehingga kesenjangan pengeluaran terhadap Garis Kemiskinan dapat terus diperkecil secara berkelanjutan.

4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indikator ini menggambarkan seberapa besar variasi atau kesenjangan tingkat kesejahteraan yang terjadi di dalam kelompok penduduk miskin (Putri & Shofwan, 2024). Semakin tinggi nilai P2, semakin besar ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin sehingga menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin berada jauh di bawah Garis Kemiskinan. Sebaliknya, semakin rendah nilai P2 menunjukkan bahwa kondisi pengeluaran penduduk miskin relatif lebih merata dan tingkat keparahan kemiskinan semakin rendah.

Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi indikator penting dalam evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan karena tidak hanya mengukur jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperlihatkan distribusi kesejahteraan di dalam kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, indikator ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana program pemerintah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan paling berat.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Singkawang selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang membaik. Pada tahun 2020 nilai P2 tercatat sebesar 0,09, kemudian meningkat hingga mencapai 0,27 pada tahun 2022 akibat dampak perlambatan ekonomi dan tekanan sosial ekonomi pascapandemi COVID-19. Setelah kondisi ekonomi mulai pulih, nilai P2 kembali menurun menjadi 0,10 pada tahun 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang sehingga tingkat keparahan kemiskinan di Kota Singkawang cenderung menurun.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat, tingkat keparahan kemiskinan Kota Singkawang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Kota Singkawang berada pada kelompok miskin yang tidak terlalu jauh dari Garis Kemiskinan, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan melalui intervensi kebijakan yang tepat. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa ketimpangan kesejahteraan di antara kelompok penduduk miskin tidak terlalu besar dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Barat.

Menurunnya nilai P2 dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa program perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, penguatan UMKM, serta pemulihan aktivitas ekonomi daerah telah berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan di antara kelompok masyarakat miskin. Perkembangan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan usaha mikro yang menjadi penopang utama perekonomian Kota Singkawang turut membantu meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun demikian, tantangan pembangunan kesejahteraan masih perlu mendapat perhatian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,42 persen, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja produktif, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal agar penurunan kemiskinan dapat

berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Singkawang

Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai berpotensi menyebabkan menurunnya kesempatan kerja dan meningkatnya pengangguran (Arif, 2026). Selain itu, kondisi pasar kerja juga menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (*skill mismatch*), sehingga tidak seluruh tenaga kerja yang tersedia dapat terserap secara optimal.

Tenaga kerja merupakan modal utama dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Jumlah dan karakteristik tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan demografi, pendidikan, dan struktur ekonomi masyarakat (Muhyiddin et al., 2026). Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja di Kota Singkawang mencapai sekitar 184 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan angkatan kerja yang aktif bekerja maupun mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Singkawang pada tahun 2025 tercatat sebesar 65,89 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk usia kerja, sekitar 66 orang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih relatif tinggi yaitu sebesar 7,42 persen, yang menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pasar kerja di Kota Singkawang masih menghadapi tantangan dalam menciptakan kesempatan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keterhubungan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja (Sakinah et al., 2026). Indikator ini menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin tinggi TPAK, semakin besar pula proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Sebaliknya, rendahnya TPAK dapat mencerminkan adanya hambatan dalam akses terhadap pekerjaan, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, maupun faktor sosial ekonomi yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pasar kerja. Di Kota Singkawang, perkembangan TPAK selama periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. TPAK meningkat dari 63,84 persen pada tahun 2020 menjadi 68,86 persen pada tahun 2022, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun setelah itu terjadi tren penurunan hingga mencapai 65,89 persen pada tahun 2025. Meskipun nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, capaian TPAK Kota Singkawang pada tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 70,9 persen.

Penurunan TPAK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia kerja belum berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kesempatan kerja, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta masih terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang pada tahun 2025 masih tergolong tinggi yaitu sebesar 7,42 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja daerah belum

mampu menyerap angkatan kerja secara optimal. Tingginya TPT yang disertai dengan TPAK yang relatif rendah mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam pembangunan ketenagakerjaan, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia, keterhubungan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, serta penciptaan lapangan kerja produktif.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Singkawang perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri, penguatan layanan informasi dan penempatan kerja, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja, menurunkan tingkat pengangguran, dan pada akhirnya mendukung percepatan penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, aktif mencari pekerjaan, dan belum memperoleh pekerjaan terhadap total angkatan kerja pada periode tertentu (BPS, 2021). TPT mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang mampu disediakan oleh perekonomian. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menciptakan lapangan kerja secara memadai, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (skill mismatch), serta terbatasnya kesempatan kerja formal dan produktif.

Perkembangan TPT Kota Singkawang selama periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi perekonomian daerah. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2021, tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebagai dampak perlambatan aktivitas ekonomi dan berkurangnya kesempatan kerja. Seiring membaiknya kondisi ekonomi daerah sejak tahun 2022, tingkat pengangguran menunjukkan tren menurun. Namun demikian, pada tahun 2025 TPT Kota Singkawang masih tercatat sebesar 7,42 persen dan termasuk salah satu yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja secara optimal. Meskipun berbagai sektor ekonomi mengalami perkembangan positif, penciptaan lapangan kerja baru masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyediakan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi tenaga kerja lokal.

Struktur ketenagakerjaan Kota Singkawang menunjukkan bahwa sektor jasa masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, diikuti oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, serta pertanian dan perikanan. Dominasi sektor jasa mencerminkan karakteristik perekonomian Kota Singkawang yang bertumpu pada aktivitas perdagangan, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun demikian, daya serap sektor-sektor tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya.

Tingginya TPT yang disertai dengan TPAK yang relatif rendah menunjukkan bahwa pasar kerja di Kota Singkawang masih menghadapi tantangan struktural. Tantangan tersebut meliputi belum optimalnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta belum optimalnya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

Oleh karena itu, upaya penurunan pengangguran perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri, penguatan layanan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, peningkatan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan

langkah tersebut, diharapkan kesempatan kerja dapat meningkat, tingkat pengangguran menurun, dan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang semakin membaik.

3. Struktur Ketenagakerjaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Struktur ketenagakerjaan Kota Singkawang menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Perkembangan sektor perdagangan, pariwisata, jasa, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, sebagian besar pekerja masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal yang produktif masih menjadi tantangan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Singkawang. Rendahnya investasi pada sektor industri pengolahan dan sektor padat karya menyebabkan kapasitas penyerapan tenaga kerja formal belum optimal. Akibatnya, sebagian angkatan kerja masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Selain struktur ketenagakerjaan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi kondisi pasar kerja di Kota Singkawang. Berdasarkan RPKD Kota Singkawang Tahun 2025–2029, sekitar 87,47 persen penduduk miskin memiliki tingkat pendidikan hanya sampai jenjang SD dan SMP. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, maupun beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Di sisi lain, masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (skill mismatch). Keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi keterampilan, serta pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan daya saing tenaga kerja lokal belum optimal. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Singkawang.

Oleh karena itu, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasional, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan keterampilan berbasis kebutuhan industri menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja produktif. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan di Kota Singkawang.

C. Keterkaitan Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di Kota Singkawang

Kemiskinan dan ketenagakerjaan merupakan dua aspek pembangunan yang memiliki keterkaitan erat. Kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar, serta mengurangi risiko terjadinya kemiskinan (Ponto, 2023). Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak dapat menyebabkan masyarakat mengalami keterbatasan pendapatan dan meningkatkan kerentanan terhadap kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan perlindungan sosial, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Kondisi Kota Singkawang menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 4,28 persen atau sekitar 10,36 ribu jiwa pada tahun 2025, aspek ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan yang perlu menjadi perhatian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang masih berada pada angka 7,42 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,89 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan indikator kemiskinan belum sepenuhnya diikuti oleh

peningkatan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Tingginya tingkat pengangguran berimplikasi terhadap kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan yang stabil. Sebagian penduduk usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (skill mismatch) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian pencari kerja belum mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi lokal melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, kapasitas UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar. Kondisi tersebut menyebabkan potensi UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyerap tenaga kerja belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kota Singkawang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kondisi ketenagakerjaan daerah. Penurunan kemiskinan yang berkelanjutan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja produktif, serta penguatan ekonomi lokal dan UMKM. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mempercepat terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan hasil identifikasi hubungan antara kemiskinan dan ketenagakerjaan tersebut, diperlukan penentuan permasalahan prioritas yang menjadi fokus intervensi kebijakan. Penetapan prioritas dilakukan untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab akar permasalahan utama dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang. Oleh karena itu, tahap selanjutnya dilakukan analisis prioritas menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG).

D. Analisis Prioritas Permasalahan

Setelah mengidentifikasi kondisi kemiskinan dan ketenagakerjaan di Kota Singkawang, langkah berikutnya adalah menentukan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani. Penentuan prioritas ini penting mengingat keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, baik dari aspek anggaran, waktu, maupun kapasitas kelembagaan, sehingga intervensi kebijakan perlu difokuskan pada permasalahan yang memiliki dampak paling besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam kajian ini, penentuan prioritas permasalahan dilakukan menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Metode ini menilai setiap permasalahan berdasarkan tiga dimensi, yaitu tingkat urgensi (urgency), tingkat keseriusan dampak (seriousness), dan potensi perkembangan permasalahan apabila tidak segera ditangani (growth). Melalui pendekatan tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang paling membutuhkan intervensi kebijakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kemiskinan di Kota Singkawang, beberapa permasalahan yang dianalisis meliputi tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kualitas sumber daya manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), perkembangan garis kemiskinan, pengembangan UMKM dan ekonomi lokal, serta integrasi data program penanggulangan kemiskinan. Hasil penilaian terhadap masing-masing permasalahan menggunakan metode USG disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness* dan *Growth*

No.	Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Skor Total
1	Angka kemiskinan masih tinggi, yaitu 10.360 jiwa atau 4,28% pada 2025, sehingga target penurunan kemiskinan belum sepenuhnya tercapai.	4	4	3	11
2	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tinggi, yaitu 7,42% pada 2025 dan merupakan tingkat tertinggi kedua di Kalimantan Barat.	5	5	5	15
3	Rendahnya kualitas SDM, tercermin dari 87,47% penduduk miskin yang berpendidikan SD hingga SMP.	5	5	4	14
4	Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang hanya mencapai 65,89%.	4	4	5	13
5	Kenaikan garis kemiskinan, dari Rp614.077 pada 2024 menjadi Rp638.961 pada 2025, yang berpotensi menekan daya beli masyarakat miskin.	4	4	4	12
6	Dukungan terhadap UMKM dan pengembangan ekonomi lokal belum optimal, sehingga kapasitas penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat masih terbatas.	4	4	4	12
7	Data program penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi secara optimal, khususnya data by name by address, sehingga berpotensi mengurangi ketepatan sasaran program.	3	3	4	10

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis *Urgency, Seriousness, and Growth (USG)*, permasalahan yang memperoleh skor prioritas tertinggi adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengangguran merupakan permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani karena memiliki tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan yang lebih besar dibandingkan permasalahan lainnya. Tingginya pengangguran tidak hanya memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan yang layak, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kerentanan kemiskinan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain memiliki tingkat urgensi yang tinggi, permasalahan pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang saling berkaitan, antara lain ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (*skill mismatch*), terbatasnya kesempatan kerja produktif, belum optimalnya pengembangan UMKM dan ekonomi lokal, serta belum terintegrasinya berbagai program pendukung ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pengangguran tidak dapat dilakukan melalui satu jenis intervensi, melainkan memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kajian ini menetapkan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai permasalahan prioritas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Root Cause Analysis (RCA). Analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendasari tingginya pengangguran sehingga alternatif kebijakan yang dirumuskan tidak hanya mampu mengatasi gejala permasalahan, tetapi juga menysasar akar penyebabnya secara lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Kerangka Analisis Determinan dan Analisis Kebijakan (Theory of Change)

Perumusan kebijakan yang efektif memerlukan suatu kerangka analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara permasalahan, penyebab, strategi intervensi, serta perubahan yang diharapkan. Dalam kajian ini digunakan pendekatan Theory of Change (ToC) sebagai kerangka analisis untuk menggambarkan bagaimana intervensi kebijakan yang diusulkan dapat berkontribusi

terhadap penurunan tingkat pengangguran dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang.

Theory of Change merupakan pendekatan yang menjelaskan alur logis perubahan mulai dari identifikasi akar permasalahan (root causes), penetapan strategi intervensi, keluaran (outputs), hasil antara (outcomes), hingga dampak jangka panjang (impact). Melalui pendekatan ini, setiap alternatif kebijakan yang dirumuskan memiliki hubungan yang jelas dengan permasalahan yang ingin diselesaikan sehingga proses penyusunan kebijakan menjadi lebih sistematis, terarah, dan berbasis bukti. Analisis determinan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Determinan

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	TPT mencapai 7,42% pada 2025, merupakan tingkat tertinggi kedua di Kalimantan Barat dan berada di atas rata-rata provinsi sebesar 4,82%.	Terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif; lapangan kerja yang tersedia masih didominasi sektor informal dan pekerjaan dengan produktivitas relatif rendah.
2	Ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja (link and match)	TPT tertinggi terdapat pada lulusan SMK/MA Kejuruan/Diploma I/II, yaitu 12,27%.	Kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri; keterhubungan antara pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan kebutuhan pasar tenaga kerja masih perlu diperkuat.
3	Terbatasnya lapangan kerja padat karya	Penyerapan tenaga kerja masih menghadapi keterbatasan, terutama bagi kelompok berpendidikan menengah ke bawah.	Rendahnya investasi pada sektor padat karya dan terbatasnya diversifikasi sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
4	Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	TPAK mencapai 65,89% pada 2025, merupakan yang kedua terendah di Kalimantan Barat, dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 70,90%.	Rendahnya partisipasi kelompok usia produktif dalam pasar kerja, terutama perempuan. Sebanyak 33.672 dari 44.024 penduduk bukan angkatan kerja merupakan perempuan yang mengurus rumah tangga.
5	Lemahnya dukungan terhadap ekonomi lokal	Kontribusi UMKM sebagai penyerap tenaga kerja berfluktuasi, meskipun relatif stabil pada kisaran 19%.	Akses permodalan, kapasitas manajerial, adopsi teknologi, dan digitalisasi usaha masih terbatas sehingga kapasitas UMKM dalam menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja belum optimal.

Sumber: Hasil Analisis

Diketahui bahwa tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Singkawang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan kesempatan kerja produktif, lemahnya daya saing UMKM, hingga belum optimalnya perlindungan sosial dan tata kelola data. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi determinan utama yang menjadi dasar penyusunan alternatif kebijakan dan strategi intervensi. Hubungan antara akar masalah, intervensi, dan hasil yang diharapkan disusun menggunakan pendekatan *Theory of Change* (ToC) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis ToC

No.	Intervensi Kebijakan	Aktivitas Utama	Output	Sasaran
1	Penguatan keterampilan tenaga kerja	Revitalisasi kurikulum pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri perkotaan dan sektor unggulan, khususnya UMKM dan pariwisata.	Tersedianya program pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.	Meningkatnya kualitas dan relevansi kompetensi tenaga kerja.
2	Peningkatan investasi daerah	Promosi peluang investasi berbasis potensi lokal; pemberian kemudahan	Meningkatnya investasi pada sektor-sektor yang memiliki	Meningkatnya kesempatan dan peluang kerja produktif.

	dan penciptaan kerja padat karya	investasi; pengembangan sektor padat karya seperti pengolahan hasil pertanian, industri kreatif, dan konstruksi skala kecil.	kapasitas penyerapan tenaga kerja tinggi.	
3	Pemberdayaan ekonomi perempuan	Penyediaan pelatihan keterampilan fleksibel berbasis potensi lokal; pengembangan usaha mikro dan kegiatan ekonomi padat karya; fasilitasi akses perempuan terhadap permodalan dan jaringan pemasaran.	Meningkatnya kapasitas dan akses perempuan terhadap kegiatan ekonomi produktif.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pasar kerja.
4	Penguatan UMKM dan ekonomi lokal	Peningkatan akses permodalan; penguatan kapasitas manajerial, keuangan, dan pemasaran digital; perluasan jaringan pemasaran; fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi produk.	Meningkatnya kapasitas usaha, akses pembiayaan, legalitas, dan jangkauan pasar UMKM.	Meningkatnya kapasitas UMKM dalam menciptakan dan mempertahankan kesempatan kerja.

Sumber : Hasil Analisis

Intervensi kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi, penguatan kapasitas UMKM, peningkatan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sinergi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan. Implementasi berbagai intervensi tersebut diharapkan menghasilkan peningkatan kompetensi tenaga kerja, bertambahnya kesempatan kerja produktif, meningkatnya produktivitas UMKM, serta membaiknya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Dalam jangka menengah, hasil tersebut diharapkan mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Selanjutnya, dalam jangka panjang, perubahan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Setiap alternatif kebijakan dirancang untuk menjawab akar permasalahan yang telah diidentifikasi sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat responsif terhadap kondisi saat ini, tetapi juga mampu mendorong perubahan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis kondisi kemiskinan dan ketenagakerjaan di Kota Singkawang, dapat disimpulkan bahwa meskipun indikator kemiskinan menunjukkan tren yang membaik, masih terdapat tantangan struktural yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) menetapkan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai permasalahan prioritas yang perlu segera ditangani. Selanjutnya, Root Cause Analysis (RCA) mengidentifikasi bahwa tingginya pengangguran dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, terbatasnya kesempatan kerja produktif, belum optimalnya pengembangan UMKM, serta pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif.

Berdasarkan temuan tersebut, Theory of Change (ToC) disusun sebagai kerangka analisis untuk menggambarkan hubungan antara akar permasalahan, strategi intervensi, hasil yang diharapkan, dan dampak kebijakan. Kerangka tersebut menjadi dasar dalam penyusunan alternatif kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja produktif, dan menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan demikian, bab berikutnya menguraikan alternatif

kebijakan beserta rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

E. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja di Kota Singkawang memiliki landasan yang kuat dalam berbagai kebijakan nasional maupun daerah. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola data dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dalam konteks Kota Singkawang, berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik melalui RPJMD, RPKD, maupun RKPD. Selain itu, kebijakan nasional yang menekankan penghapusan kemiskinan ekstrem, perlindungan sosial adaptif, dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi acuan dalam penyusunan strategi pembangunan daerah. Adapun regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan 1 (No Poverty) yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, serta Tujuan 8 (Decent Work and Economic Growth) yang menekankan penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045 mengamanatkan pembangunan manusia yang berkualitas, pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan transformasi ekonomi yang inklusif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menginstruksikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk memastikan ketepatan sasaran program, integrasi data, serta sinergi lintas sektor dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 Menempatkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan perlindungan sosial adaptif sebagai prioritas pembangunan nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025–2029. Misi pembangunan daerah diarahkan pada penguatan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan kesempatan kerja, penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan penurunan kemiskinan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2026 menetapkan prioritas pembangunan daerah pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial berbasis data terpadu.
7. Program Universal Health Coverage (UHC) Kota Singkawang mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu instrumen pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
8. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyediaan bantuan pendidikan, beasiswa daerah, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia

industri.

9. Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi dasar penguatan tata kelola data kemiskinan dan perlindungan sosial agar program bantuan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran berbasis by name by address.
10. Teori Human Capital dan Link and Match Pendidikan Vokasi
Menekankan pentingnya investasi pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja agar kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat.

F. Ringkasan Analisis Situasi (Evidence Base)

Berdasarkan hasil analisis kondisi perekonomian, ketenagakerjaan, dan kemiskinan Kota Singkawang, diperoleh sejumlah temuan utama yang menjadi dasar dalam perumusan alternatif kebijakan penanggulangan kemiskinan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun beberapa indikator pembangunan sosial ekonomi mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya terkait penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat. Ringkasan kondisi tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Kemiskinan masih menjadi isu strategis meskipun menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin Kota Singkawang sebesar 4,28 persen atau sekitar 10,36 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,53 persen atau 10,82 ribu jiwa. Meskipun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat rentan yang berisiko kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat keterbatasan akses pekerjaan dan peningkatan biaya hidup.
2. Garis Kemiskinan terus meningkat. Garis Kemiskinan Kota Singkawang naik dari Rp510.596 per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp638.961 per kapita per bulan pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 25,14 persen dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk mempertahankan standar hidup layak.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan tren menurun. Setelah mencapai puncak sebesar 68,86 persen pada tahun 2022, TPAK menurun menjadi 65,89 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia kerja belum berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan ekonomi.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih relatif tinggi. Pada tahun 2025 TPT Kota Singkawang tercatat sebesar 7,42 persen, termasuk salah satu yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Tingginya TPT mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi angkatan kerja yang tersedia.
5. Kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin masih menjadi tantangan. Berdasarkan RPKD Kota Singkawang Tahun 2025–2029, sebagian besar penduduk miskin masih berpendidikan rendah sehingga memiliki keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal dan produktif.
6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan perbaikan. Setelah sempat meningkat pada tahun 2022 akibat dampak pandemi COVID-19, nilai P1 dan P2 terus menurun hingga berada pada level yang relatif rendah pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan maupun ketimpangan antarpenduduk miskin semakin mengecil.
7. UMKM dan ekonomi lokal belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja produktif. Keterbatasan akses permodalan, legalitas usaha, sertifikasi produk, dan

pemasaran digital masih menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

G. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, akar masalah, serta kerangka Theory of Change (ToC), permasalahan prioritas dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (skill mismatch), rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif, belum optimalnya pengembangan UMKM dan ekonomi lokal, belum optimalnya sistem perlindungan sosial adaptif, serta perlunya penguatan tata kelola program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil Root Cause Analysis (RCA), dirumuskan lima alternatif kebijakan yang saling melengkapi untuk mengatasi akar permasalahan tersebut. Alternatif kebijakan yang disusun mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan keterampilan kerja, penciptaan lapangan kerja produktif dan perluasan kesempatan kerja, penguatan daya saing UMKM dan ekonomi lokal, penguatan perlindungan sosial adaptif dan pengurangan beban pengeluaran, serta penguatan tata kelola data dan integrasi program penanggulangan kemiskinan. Kelima alternatif tersebut dirancang sebagai satu kesatuan strategi yang mendukung percepatan penurunan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam kerangka kebijakan yang diusulkan, Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Kerja diprioritaskan sebagai alternatif kebijakan utama karena secara langsung menjawab akar permasalahan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengurangan ketidaksesuaian kompetensi (skill mismatch). Sementara itu, empat alternatif lainnya berperan sebagai kebijakan pendukung yang memperkuat penciptaan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, menjaga ketahanan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui tata kelola data yang terintegrasi. Dengan demikian, seluruh alternatif kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang saling memperkuat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang.

1. Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Kerja (Peningkatan Kualitas SDM)

Revitalisasi pendidikan vokasi dan keterampilan kerja merupakan alternatif kebijakan yang diprioritaskan untuk mengatasi tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Singkawang. Alternatif ini disusun berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa salah satu akar permasalahan pengangguran adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (skill mismatch). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian tenaga kerja lokal belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja, sehingga mengurangi peluang memperoleh pekerjaan yang layak.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja produktif. Selain mendukung penyerapan tenaga kerja pada sektor formal, pengembangan keterampilan juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang dapat memperkuat perekonomian daerah. Dengan demikian, revitalisasi pendidikan vokasi tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga menjadi salah satu strategi dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Implementasi alternatif kebijakan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan kerja agar kompetensi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi daerah dan kebutuhan dunia kerja.

2. Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan Perluasan Kesempatan Kerja

Penciptaan lapangan kerja produktif merupakan alternatif kebijakan yang diarahkan untuk mengatasi tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat usia produktif di Kota Singkawang. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan perkembangan yang positif, hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi angkatan kerja yang terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya pencari kerja baru dan tenaga kerja berkompotensi rendah, masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak.

Alternatif kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal melalui penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, baik pada sektor formal maupun sektor produktif lainnya. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong investasi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja, memperluas program padat karya produktif, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Keberhasilan implementasi alternatif kebijakan ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar penciptaan lapangan kerja tidak hanya mampu mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Penguatan Daya Saing UMKM dan Ekonomi Lokal

Penguatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengembangan ekonomi lokal merupakan alternatif kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. UMKM memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi di Kota Singkawang karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, belum optimalnya legalitas usaha, serta terbatasnya akses pemasaran, khususnya melalui platform digital. Alternatif kebijakan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui penguatan aspek pembiayaan, legalitas usaha, pengembangan kompetensi pelaku usaha, serta perluasan akses pasar. Selain meningkatkan produktivitas usaha, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, penguatan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi alternatif kebijakan ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah usaha, tetapi juga mampu menghasilkan UMKM yang produktif, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika pasar.

4. Penguatan Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengurangan Beban Pengeluaran

Penguatan perlindungan sosial adaptif merupakan alternatif kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dan rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi. Meskipun tingkat kemiskinan di Kota Singkawang menunjukkan tren menurun, masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan kembali jatuh ke dalam

kemiskinan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, maupun perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, sistem perlindungan sosial perlu dikembangkan agar lebih adaptif, terintegrasi, dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Alternatif kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan kualitas data penerima manfaat, peningkatan cakupan perlindungan sosial, serta integrasi program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain menjaga daya beli rumah tangga miskin, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko kemiskinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Keberhasilan implementasi alternatif kebijakan ini memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan data sosial ekonomi dan pelaksanaan program perlindungan sosial. Pendekatan yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan akurasi sasaran program sekaligus memperkuat sinergi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Penguatan Tata Kelola Data dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Penguatan tata kelola data dan integrasi program penanggulangan kemiskinan merupakan alternatif kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang. Keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum optimalnya integrasi data antarperangkat daerah berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran program, tumpang tindih intervensi, serta kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Alternatif kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan sistem data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data sektoral yang dimiliki pemerintah daerah. Integrasi data tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan implementasi alternatif kebijakan ini memerlukan koordinasi yang kuat antarperangkat daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, saling mendukung, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.

PENUTUP

Kemiskinan di Kota Singkawang merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun, tantangan dalam pencapaian target penanggulangan kemiskinan masih cukup besar, terutama akibat tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kesempatan kerja produktif, serta belum optimalnya pengembangan UMKM dan ekonomi lokal. Hasil analisis USG menunjukkan bahwa tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan permasalahan prioritas karena memiliki tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan yang paling tinggi dibandingkan permasalahan lainnya. Analisis akar masalah (Root Cause Analysis) menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif, lemahnya daya saing UMKM, belum optimalnya perlindungan sosial adaptif, serta perlunya penguatan tata kelola data program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan lima alternatif kebijakan yang saling melengkapi. Melalui analisis perbandingan alternatif kebijakan, Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Kerja ditetapkan sebagai alternatif kebijakan utama karena dinilai paling efektif dalam menjawab akar permasalahan sekaligus memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan percepatan penurunan kemiskinan., sedangkan alternatif lainnya berfungsi memperkuat implementasi kebijakan sehingga diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, Pemerintah Kota Singkawang direkomendasikan untuk mengimplementasikan kebijakan "Penguatan Pendidikan Vokasi Berbasis Potensi Lokal yang Terintegrasi dengan Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan Pengembangan UMKM sebagai Strategi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kota Singkawang". Kebijakan ini dipilih karena mampu menjawab akar permasalahan yang menjadi penyebab tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu belum optimalnya kualitas sumber daya manusia, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, terbatasnya lapangan kerja produktif, serta belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan UMKM. Melalui kebijakan tersebut diharapkan tercipta keterhubungan (*link and match*) antara pendidikan, pelatihan kerja, kebutuhan pasar kerja, dan pengembangan ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, serta mempercepat penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., & Manning, C. (2006). Labour market dimensions of poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 42(2), 235–261. <https://doi.org/10.1080/00074910600873674>
- Arif, M. N. R. A. (2026, July 3). *Jobless Growth dan Ancaman bagi Kesejahteraan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://www.uinjkt.ac.id/id/jobless-growth-dan-ancaman-bagi-kesejahteraan>
- Bappenas. (2025, October 9). *PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM BAB I PENDAHULUAN*. Bappenas. https://sepakat-demo.bappenas.go.id/km-wiki/PANDUAN_UMUM_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_I_PENDAHULUAN
- BPS. (2021). *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kalbar. (2026). *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2026* (Vol. 43). BPS Kalimantan Barat. <https://kalbar.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/781865cc79397994168774e9/provinsi-kalimantan-barat-dalam-angka-2026.html>
- BPS Kota Singkawang. (2026). *Kota Singkawang Dalam Angka* (Vol. 26). BPS Kota Singkawang. <https://singkawangkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/554555a4d1b9c316dd2d6d36/kota-singkawang-dalam-angka-2026.html>
- Disnakertransesdm. (2026). *ANALISIS KETIDAKSESUAIAN KETERAMPILAN (SKILLS MISMATCH) DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI PENGUATAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN*. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Sumber Daya Mineral. https://disnakertransesdm.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/41_analisis-ketidaksesuaian-keterampilan-skills-mismatch-dan-penyerapan-tenaga-kerja-di-indonesia-tantangan-dan-strategi-penguatan-kebijakan-ketenagakerjaan
- Ferezagia, D. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol1/iss1/1>

- Irham, A. R., Patricia, M. W., Bastari, A. D., & Sucitra, H. M. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah. *Zoning: Journal of Urban and Regional Planning*, 2(2), 92–98. <https://doi.org/10.33019/37tah858>
- Muhyiddin, M., Amrizal, M. D. R., & Wahyuningrat, J. (2026). Outlook Ketenagakerjaan Indonesia 2026–2029: Dari Bonus Demografi ke Tantangan Kualitas Pekerjaan. *Bappenas Working Papers*, 9(1), 113–129. <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.540>
- Murti, S. A., & Kurniawan, R. (2020). The Linkage of Employment to Poverty in Central Java at 2010-2017. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(2), 195–206. <https://doi.org/10.15408/sjie.v9i2.14466>
- Ponto, V. M. (2023). Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals). *Cendekia Niaga*, 7(1), 85–96. <https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.792>
- Putri, S. H. M., & Shofwan. (2024). IMPLEMENTASI MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX DALAM MENGUKUR KEEFEKTIVITASAN PENGUKURAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(3), 697–711. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.03>
- Rambe, R. A., Purmini, P., Alfansi, L., Armelly, A., & Yusnida, Y. (2023). Examining the roles of labor factors, investment, and industrialization in poverty alleviation: Empirical evidence from Sumatra, Indonesia. *Poverty & Public Policy*, 15(4), 431–446. <https://doi.org/10.1002/pop4.385>
- Sakinah, A., Parawanza, A. A., Ginting, F. H. B., Febina, J., Matondang, M. A., & Lubis, N. P. S. (2026). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 8306–8314. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10137>
- Setioko, W., & Wangsanata, V. C. (2025). UTILIZING THEORY OF CHANGE IN DESIGNING IMPACTFUL SOCIAL AND EDUCATIONAL PROGRAMS. *SEEIJ (Social Economics and Ecology International Journal)*, 9(1), 27–37. <https://doi.org/10.21512/seeij.v9i1.12184>
- Syncore Indonesia. (2025, April 14). *Menggali Akar Masalah BLUD dengan Metode USG dalam Renstra—BLUD.co.id*. <https://blud.co.id/wp/menggali-akar-masalah-blud-dengan-metode-usg-dalam-renstra/>
- Winsky. (2021). Belajar Teknik Asesmen Risiko – Analisis Akar Penyebab (Root Cause Analysis—RCA). *Indonesia Risk Management Professional Association*. <https://irmapa.org/belajar-teknik-asesmen-risiko-analisis-akar-penyebab-root-cause-analysis-rca/>